

STRATEGI PENGELOLAAN POTENSI HUTAN PINUS MENJADI OBJEK WISATA OLEH PERUM PERHUTANI DI DESA DARMACAANG KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS

DWI TRESNA LAILASARI

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah: Hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis di Desa Darmacaang diperoleh adanya beberapa permasalahan sebagai berikut. Hutan pinus merupakan aset yang tidak dikelola dengan baik oleh Perum Perhutani, sehingga keberadaannya kurang terawat. Potensi hutan pinus yang belum dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak memberikan income pada wilayah setempat. Proses pengelolaan hutan pinus belum dapat dimaksimalkan. Hal ini terlihat tidak dikelolanya hutan pinus menjadi objek wisata. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis? Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Strategi pengelolaan potensi Hutan Pinus Menjadi Objek Wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis belum semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Masih ada beberapa indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hambatan yang dihadapi oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata adalah Masalah kebijakan dimana mengingat Perum Perhutani merupakan instansi BUMN, sehingga semua keputusan ada pada tingkat pusat, maka jika ada masalah di lapangan sulit dipecahkan karena menunggu perintah dari pusat. SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Sarana dan prasarana yang ada di lokasi hutan pinus masih belum memadai. Proses pengelolaan dilakukan oleh Perum Perhutani, sehingga memperlambat semua kebijakan yang dikeluarkan, mengingat cakupan Perum Perhutani sangat luas. Upaya yang dilakukan adalah menyusun sebuah kebijakan yang jelas, yang dapat di gunakan untuk mengatasi masalah di lapangan sulit dipecahkan karena menunggu perintah dari pusat. Meningkatkan SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, dan menambah sarana lain untuk mempermudah pengelolaannya.

Kata Kunci: *Strategi Pengelolaan Potensi Hutan Pinus*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut, tidak terkecuali dengan pembangunan sektor kepariwisataan.

Pengelolaan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sector*) dalam perekonomian Nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan Nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata digariskan bahwa pengelolaan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam

menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pengelolaan wisata yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pengembangan wisata harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pengembangan wisata pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Dengan demikian, pengelolaan wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pengelolaan wisata dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pariwisata merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan

wilayah regional dan nasional, karena pariwisata mencakup dan terkait dengan sektor lain seperti: kondisi politik, ekonomi, kamtibmas, telekomunikasi, perdagangan, dan industri serta sektor lainnya.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis di Desa Darmacaang diperoleh adanya beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Hutan pinus merupakan aset yang tidak dikelola dengan baik oleh Perum Perhutani, sehingga keberadaannya kurang terawat. Hal ini terbukti dengan tidak lagi dioperasionalkannya hutan pinus menjadi hutan wisata.
2. Potensi hutan pinus yang belum dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak memberikan income pada wilayah setempat.
3. Proses pengelolaan hutan pinus belum dapat dimaksimalkan. Hal ini terlihat tidak dikelolanya hutan pinus menjadi objek wisata.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih jauh mengenai, "**Strategi Pengelolaan Potensi Hutan Pinus Menjadi Objek Wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis**"

Dengan permasalahan yang terjadi adalah

1. Bagaimana strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis?

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

A. LANDASAN TEORITIS

Strategi merupakan cara dalam peningkatan kualitas tertentu. Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Yoeti (1996:164) bahwa: "strategi digunakan dilapangan untuk mencapai tujuan dalam menghadapi pesaing agar dapat memenangkan target". Lebih lanjut Yoeti (1996:64) menambahkan bahwa startegi diperlukan agar perencanaan dapat dilaksanakan secara praktis dan spesifik mungkin, maka didalamnya harus mencakup pertimbangan-pertimbangan dan penyesuaian terhadap reaksi-reaksi oarang dan pihak yang dipengaruhi kegiatan tersebut.

Hutan dikelola untuk tujuan serbaguna, dengan tujuan akhir adalah untuk mendapatkan nilai manfaat bersih total yang paling tinggi. Pengelolaan hutan untuk tujuan produksi kayu, harus memperhatikan dan mendukung (compatible) tujuan lain, seperti DAS, wildlife, rekreasi, dll. Pada beberapa kasus, penggunaan kawasan hutan

bertentangan (incompatible) dengan tujuan pengelolaan yang lain seperti pengelolaan areal penggembalaan di dalam kawasan hutan terkadang tidak compatible dengan pengelolaan hutan untuk tujuan produksi kayu. Hal ini mengharuskan pengelola hutan membuat keputusan tentang prioritas penggunaan lahan hutan. Manajemen hutan membutuhkan pengkajian dan aplikasi teknik-teknik analisis untuk membantu memilih alternatif manajemen yang memberikan kontribusi terbaik bagi pencapaian tujuan pengelolaan hutan.

Tujuan pengelolaan hutan sangat tergantung pada tujuan pemilik hutan dan situasi ekonomi yang ada pada wilayah dimana hutan tersebut berada. Pada kawasan hutan negara, tujuan pengelolaan hutan sangat ditentukan oleh faktor politik dan tingkat kepentingan terhadap areal hutan. Tingkat kepentingan tersebut terkadang tidak dapat diukur dalam satuan ukuran nilai uang. Pengelolaan hutan negara biasanya lebih banyak difokuskan pada perlindungan tata air yang dibayar dengan kelestarian supply air, dan dikelola dengan tujuan serba guna. Sedangkan hutan milik dikelola dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang biasanya terfokus pada total produksi dan total benefit yang dapat diperoleh dari lahan hutan tersebut. Peraturan Menteri Kehutanan No: PP.01/Menhut-11/2004 dijelaskan bahwa:

Pengertian Social Forestry adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan. Program Social Forestry, dengan demikian, pada dasarnya berintikan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan di sekitar hutan melalui suatu sistem pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama, mitra kerja, dan sebagai pihak yang harus mendapat bagian kesejahteraan yang memadai dari kegiatan pengelolaan hutan. Program Social Forestry mengedepankan partisipasi masyarakat desa sebagai unsur utama dalam pengelolaan hutan.

Langkah-langkah pengelolaan lingkungan pariwisata dikemukakan oleh Darsoprayitno (2013:323) yaitu:

- 1) Inventarisasi tata alam dan binaan dan sekaligus mempelajari dampaknya (dan selanjutnya yang dimaksud lingkungan yaitu alam dan binaan).
- 2) Pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan.
- 3) Mantapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan.
- 4) Mengidentifikasi tanggungjawab masing-masing kelompok kerja pengelolaan

- 5) Pemandu tata laksana pengelolaan lingkungan dengan tata laksana pengelolaan organisasi perusahaan
- 6) Tata laksana pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan tenaga kerja pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan anggapan dasar sebagai berikut.

1. Strategi diperlukan agar perencanaan dapat dilaksanakan secara praktis dan spesifik mungkin, maka didalamnya harus mencakup pertimbangan-pertimbangan dan penyesuaian terhadap reaksi-reaksi orang dan pihak yang dipengaruhi kegiatan tersebut.
2. Pengelolaan hutan dilakukan untuk mendapatkan nilai manfaat bersih total yang paling tinggi. Pengelolaan hutan untuk tujuan produksi kayu, harus memperhatikan dan mendukung (*compatible*).
3. Strategi pengelolaan hutan merupakan rangkaian strategi kegiatan pengembangan dan pengurusan hutan negara dan hutan hak yang dilakukan sendiri oleh pemiliknya/masyarakat dengan fasilitasi dari semua stakeholder terkait, serta memperhatikan prinsip-prinsip pengusahaan hutan

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk menerapkan teori atau menguji teori

dalam kaitannya dengan pemanfaatannya dalam dunia kepariwisataan. Penelitian ini berupaya menggambarkan dan mengungkapkan tentang strategi pengembangan Wisata Alam Darma Caang Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitar Di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena "Metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan" (Surakhmad, 2008:13).

Lebih lanjut Surakhmad (2009:132) mengemukakan bahwa ciri-ciri metode deskriptif adalah: "(1) Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual; dan (2) data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa".

Sementara itu Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2007:2) mengemukakan bahwa: "pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif, yang melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Strategi Pengelolaan Potensi Hutan Pinus Menjadi Objek Wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang

**Kecamatan Cikoneng
Kabupaten Ciamis**

Strategi Pengelolaan Potensi Hutan Pinus Menjadi Objek Wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, dilihat dari beberapa dimensi yang menjadi tolok ukurnya tampak sebagaimana dalam deskripsi berikut.

a. Inventarisasi tata alam dan binaan dan sekaligus mempelajari dampaknya (dan selanjutnya yang dimaksud lingkungan yaitu alam dan binaan)

Dalam rangka pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan penataan alam dengan baik melalui analisis dampak lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hutan pinus yang ada Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis sudah tidak terawat lagi, terbukti dengan tidak asrinya lingkungan disekitar hutan pinus selain itu mengingat hutan pinus sekarang tidak dapat dijadikan sebagai tempat wisata lagi maka tidak ada lagi wisatawan disana, para pedagangpun di sekitar hutan pinuspun yang dukunya banyak sekarang tidak ada.

Langkah kedua yang dilakukan Perum perhutani dalam rangka pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adalah melakukan

pembinaan langsung pada masyarakat sekitar terutama kepada mereka yang akan terjun langsung ikut dalam proses pengelolaan hutan pinus.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selama ini pembinaan langsung berupa pelatihan-pelatihan seputar pengelolaan lingkungan dengan baik dalam pada masyarakat sekitar terutama kepada mereka yang akan terjun langsung ikut dalam proses pengelolaan hutan pinus dalam tiga bulan sekali itu pernah dilakukan namun tidak maksimal.

b. Pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan

Dalam rangka pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, melalui dimensi pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya masyarakat desa sebagai unsur utama dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan dengan harapan masyarakat mampu mendapat bagian kesejahteraan yang memadai dari kegiatan pengelolaan

hutan, dilakukan meski masyarakat hanya sebagian kecilnya saja, dengan menempatkan masyarakat untuk aktif dilapangan mengawasi, menjalankan strategi yang telah direncanakan perum perhutani selain itu perum perhutani memperbolehkan masyarakat untuk ikut berjualan di sekitar area wisata.

Sebuah kebijakan akan berhasil dengan baik apabila di dukung oleh banyak factor. Menurut Anderson (dalam Wahab, 2001:3) merumuskan bahwa:

Kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi." Sehingga dapat kita lihat bahwa terdapat kesamaan dari ketiga definisi dari para ahli tersebut. kesamaan tersebut adalah kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh aparatur pemerintahan atau orang-orang yang memiliki wewenang dalam menangani masalah-masalah publik

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa sebuah kebijakan akan dapat direalisasikan apabila disesuaikan dengan topic yang sedang digarap. Begitu halnya berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan, dimana kebijakan yang diambil sebagai langkah tindak yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Berkaitan dengan pelaksanaan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum

Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, dilihat dari dimensi pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan, telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

a. Mantapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan

Dalam rangka pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, melalui dimensi pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan di sekitar hutan melalui suatu sistem pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama, mitra kerja, dan sebagai pihak yang harus mendapat bagian kesejahteraan yang memadai dari kegiatan pengelolaan hutan., dan mengedepankan partisipasi masyarakat desa sebagai unsur utama dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perum Pehutani yang merupakan badan usaha yang memiliki 2 pendapatan yakni pendapatan kayu dan pendapatan bukan kayu memantapkan tujuannya dengan

megeelola hutan pinus menjadi objek wisata benar adanya.

b. Mengidentifikasi tanggungjawab masing-masing kelompok kerja pengelolaan, dengan indikator:

Dalam rangka pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, melalui dimensi mengidentifikasi tanggungjawab masing-masing kelompok kerja pengelolaan, telah dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perum Perhutani membagi tugas satu orang untuk mengidentifikasi, mengawasi kinerja per satu kelompok kerja (yang mengiklankan/mempromosikan kawasan wisata satu orang, pemandu wisata satu orang, fasilitator satu orang, karcis masuk satu orang, parkir satu orang, pemungutan pajak pedagang satu orang), sesuai dengan kemampuan pegawainya.

c. Pemandu tata laksana pengelolaan lingkungan dengan tata laksana pengelolaan organisasi perusahaan

Langkah dalam rangka pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adalah semua kegiatan pengelolaan lingkungan tersebut di pandu oleh seseorang yang faham betul seputar hutan pinus tersebut (kuncen).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada kuncen di kawasan hutan pinus Darmacaang, yang ada adalah pemandu wisata yang berasal dari masyarakat setempat yakni 5 orang yang dipilih dan dipercaya kelima orang tersebut faham betul akan karakteristik, sejarah dan lain-lainnya tentang hutan pinus tersebut.

d. Tata laksana pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan tenaga kerja pengelolaan lingkungan

Langkah yang dilakukan dalam rangka pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adalah melakukan tata laksana pengendalian pengelolaan lingkungan yakni dengan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan yang di lakukan baik oleh petugas yang langsung ke lapangan ataupun yang hanya sekedar mengawasi yang kemudian akan tembus laporan kerja tersebut ke Asisten Perhutani (Asper) per bulannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam hal tata laksana pengendalian pengelolaan lingkungan yakni dengan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan yang di lakukan baik oleh petugas yang langsung ke lapangan ataupun yang hanya sekedar mengawasi yang kemudian akan tembus laporan kerja tersebut ke Asisten Perhutani (Asper) per bulannya, telah dilaksanakan dengan baik.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut.

1. Inventarisasi tata alam dan binaan dan sekaligus mempelajari dampaknya (dan selanjutnya yang dimaksud lingkungan yaitu alam dan binaan)

Hambatan pertama yang dihadapi dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adalah Masalah kebijakan dimana mengingat Perum Perhutani merupakan instansi BUMN, sehingga semua keputusan ada pada tingkat pusat, maka jika ada masalah di lapangan sulit dipecahkan karena menunggu perintah dari pusat, SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Sarana dan prasarana yang ada di lokasi hutan pinus di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, masih belum memadai. Proses pengelolaan dilakukan oleh Perum Perhutani,

sehingga memperlambat semua kebijakan yang dikeluarkan, mengingat cakupan Perum Perhutani sangat luas. SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adalah Masalah kebijakan dimana mengingat Perum Perhutani merupakan instansi BUMN, sehingga semua keputusan ada pada tingkat pusat, maka jika ada masalah di lapangan sulit dipecahkan karena menunggu perintah dari pusat. SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Sarana dan prasarana yang ada di lokasi hutan pinus di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, masih belum memadai. Proses pengelolaan dilakukan oleh Perum Perhutani, sehingga memperlambat semua kebijakan yang dikeluarkan, mengingat cakupan Perum Perhutani sangat luas.

2. Pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan

Hambatan kedua yang dihadapi dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng

Kabupaten Ciamis, indikator Pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan adalah Kurangnya kompetensi SDM Pegawai. Kualitas SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Sarana dan prasarana yang ada di lokasi hutan pinus di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, masih belum memadai. Proses pengembangan kebijakan belum maksimal. Masih banyak pegawai yang tidak mengetahui kebijakan yang sesungguhnya.

Rendahnya SDM pegawai tersebut, disebabkan karena kurangnya dari aspek keterampilan. Siagian (1987: 134) mengidentifikasi bahwa tiga jenis kelemahan keterampilan yang melekat pada pegawai Indonesia yaitu :

1. Kemampuan manajerial, yaitu kurangnya kemampuan memimpin menggerakkan bawahan, melakukan koordinasi dan mengambil keputusan.
2. Kemampuan teknis, yaitu kurangnya kemampuan untuk secara terampil yang bersifat pembangunan.
3. Kemampuan teknologis, yaitu kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan hasil-hasil penemuan teknologi dalam pelaksanaan tugas seperti halnya Automatic Data Processing (ADP) atau

Electronic Data Processing (EDP).

4. Mantapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan

Dengan demikian maka dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata dilihat dari indikator mantapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adalah Hambatan dalam memantapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan adalah masalah SDM pegawai yang masih kurang. Sarana yang pendukung dalam memantapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan. Kebijakan yang mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan. SDM masyarakat yang mendukung keberhasilan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan masih kurang. Pengetahuan pegawai pelaksanaan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan masih kurang.

3. Mengidentifikasi tanggungjawab masing-masing kelompok kerja pengelolaan

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata mengenai indikator mengidentifikasi tanggungjawab masing-masing kelompok kerja pengelolaan di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adalah Masalah kebijakan dimana mengingat Perum Perhutani merupakan instansi BUMN, sehingga semua keputusan ada pada tingkat pusat, maka jika ada masalah di lapangan sulit dipecahkan karena menunggu perintah dari pusat. SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Sarana dan prasarana yang ada di lokasi hutan pinus di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, masih belum memadai. Proses pengelolaan dilakukan oleh Perum Perhutani, sehingga memperlambat semua kebijakan yang dikeluarkan, mengingat cakupan Perum Perhutani sangat luas. SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal.

Hasil penelitian diperoleh kenyataan bahwa masalah kebijakan menjadi salah satu penghambat paling serius, mengingat kebijakan yang ada masih belum mengena terhadap permasalahan pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan

Cikoneng Kabupaten Ciamis. Kebijakan yang tersedia masih bersifat umum dan tidak mengikat.

4. Tata laksana pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan tenaga kerja pengelolaan lingkungan

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, terutama dalam indikator tata laksana pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan tenaga kerja pengelolaan lingkungan, adalah SDM pelaksana Tata Laksana Pengendalian, Informasi, Pelaporan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pengelolaan Lingkungan. SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Sarana dan prasarana mendukung tata laksana pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan tenaga kerja pengelolaan lingkungan. Kompetensi pelaksana tata laksana pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan tenaga kerja pengelolaan lingkungan.

Dengan demikian maka yang menjadi hambatan dalam tata laksana pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan tenaga kerja pengelolaan lingkungan, adalah masalah SDM, sarana dan kompetensi.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan oleh Perum Perhutani untuk

melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut.

- a. Inventarisasi tata alam dan binaan dan sekaligus mempelajari dampaknya (dan selanjutnya yang dimaksud lingkungan yaitu alam dan binaan)

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pertama yang dihadapi dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adalah Menyusun sebuah kebijakan yang jelas, yang dapat di gunakan untuk mengatasi masalah di lapangan sulit dipecahkan karena menunggu perintah dari pusat. Meningkatkan SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di lokasi hutan pinus di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, dan menambah sarana lain untuk mempermudah pengelolaannya. Memberikan mandat atau kepercayaan kepada

pihak desa setempat untuk pengelolaan objek wisata tersebut, sehingga kebijakan yang dikeluarkan mudah dan tepat sasaran. Memaksimalkan SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adalah pembuatan kebijakan dimana mengingat Perum Perhutani merupakan instansi BUMN, sehingga semua keputusan ada pada tingkat pusat, maka jika ada masalah di lapangan sulit dipecahkan karena menunggu perintah dari pusat. SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Sarana dan prasarana yang ada di lokasi hutan pinus di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, masih belum memadai. Proses pengelolaan dilakukan oleh Perum Perhutani, sehingga memperlambat semua kebijakan yang dikeluarkan, mengingat cakupan Perum Perhutani sangat luas.

Hal ini sejalan dengan pendapat Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2012:139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai:

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah—perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atas menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dengan demikian bahwa inventarisasi tata alam dan binaan dan sekaligus mempelajari dampaknya (dan selanjutnya yang dimaksud lingkungan yaitu alam dan binaan), melalui pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

- b. Pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kedua yang dihadapi dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, indikator Pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan adalah Meningkatkan kompetensi SDM Pegawai, Meningkatkan kualitas SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani. Memperbaiki dan

menambah sarana dan prasarana yang ada di lokasi hutan pinus di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamisi. Memaksimalkan proses pengembangan kebijakan Meningkatkan pengetahuan pegawai yang tidak mengetahui kebijakan yang sesungguhnya

Hasil penelitian diperoleh kenyataan bahwa yang menjadi masalah dalam pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan adalah meningkatkan SDM pegawai maupun masyarakat sebagai mitra pegawai dengan pendidikan dan pelatihan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hasibuan (2006 : 70) menyatakan bahwa:

Pendidikan dan pelatihan merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan di dalam kelas berlangsung lama, dan biasanya menjawab why. Latihan berorientasi pada praktek.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari proses belajar baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal yang bertujuan untuk memahami konsep pengetahuan yang komprehensif serta untuk meningkatkan keterampilan baik

secara skill, kognitif maupun afektif.

- c. Mantapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ketiga yang dihadapi dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata dilihat dari indikator mantapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adalah memantapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan adalah meningkatkan SDM pegawai. Sarana yang pendukung dalam memantapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan. Kebijakan yang mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan. Meningkatkan SDM masyarakat yang mendukung keberhasilan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan. Meningkatkan pengetahuan pegawai pelaksanaan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam masalah pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan strategi pengelolaan

potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adalah meningkatkan SDM masyarakat, kebijakan, sarana dan SDM pegawai dengan pendidikan dan pelatihan.

Hasil di atas sejalan dengan Instruksi Presiden RI No. 15 Tahun 1974 dijelaskan tentang pengertian pelatihan bahwa :

Latihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar system pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif lebih singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori.

Dengan demikian maka pendidikan dan pelatihan bagian yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan, karena di dalam pelaksanaan pelatihan terdapat unsure pendidikan yaitu terdapat proses belajar yang dilakukan oleh instruktur terhadap peserta untuk memperoleh keterampilan sesuai dengan pekerjaan tertentu yang ingin dilatihkan.

- d. Mengidentifikasi tanggungjawab masing-masing kelompok kerja pengelolaan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan keempat yang dihadapi dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata mengenai indikator

mengidentifikasi tanggungjawab masing-masing kelompok kerja pengelolaan di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adalah Membuat kebijakan dimana mengingat Perum Perhutani merupakan instansi BUMN, sehingga semua keputusan ada pada tingkat pusat, maka jika ada masalah di lapangan sulit dipecahkan karena menunggu perintah dari pusat. Memaksimalkan SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di lokasi hutan pinus di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Meningkatkan proses pengelolaan dilakukan oleh Perum Perhutani, sehingga memperlambat semua kebijakan yang dikeluarkan, mengingat cakupan Perum Perhutani sangat luas. Meningkatkan SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani.

Hasil penelitian diperoleh kenyataan bahwa masalah kebijakan menjadi salah satu penghambat paling serius, mengingat kebijakan yang ada masih belum mengena terhadap permasalahan pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Kebijakan yang tersedia masih bersifat umum dan tidak mengikat.

Menurut Quade (1984: 310), dalam proses implementasi

kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Dengan demikian maka kebijakan mengidentifikasi tanggungjawab masing-masing kelompok kerja pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

- e. Pemandu tata laksana pengelolaan lingkungan dengan tata laksana pengelolaan organisasi perusahaan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan lima yang dihadapi dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, terutama dalam pelaksanaan pemandu tata laksana pengelolaan lingkungan dengan tata laksana pengelolaan organisasi perusahaan adalah. Meningkatkan SDM pemandu jarang ditemukan. Meningkatkan Kompetensi pemandu yang ada masih kurang. Meningkatkan Pendidikan pemandu tidak linier. Meningkatkan Pengetahuan pemandu tata laksana pengelolaan lingkungan dengan tata laksana pengelolaan organisasi

perusahaan, masih kurang. Meningkatkan SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani.

Hasil penelitian diperoleh kenyataan bahwa membuat kebijakan menjadi salah satu penghambat paling serius, adalah meningkatkan SDM pegawai melalui pelatihan dan pengembangan.

Menurut Mariot Tua Efendi H (2002) bahwa :

Latihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan dan pengembangan merupakan dua konsep yang sama, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Tetapi, dilihat dari tujuannya, umumnya kedua konsep tersebut dapat dibedakan. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, dan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang

Dengan demikian maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam dimensi pemandu tata laksana pengelolaan lingkungan dengan tata laksana

pengelolaan organisasi perusahaan, telah dilaksanakan dengan pelatihan dan pengembangan.

- f. Tata laksana pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan tenaga kerja pengelolaan lingkungan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan keenam yang dihadapi dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, terutama dalam indikator tata laksana pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan tenaga kerja pengelolaan lingkungan, adalah Meningkatkan SDM pelaksana Tata Laksana Pengendalian, Informasi, Pelaporan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pengelolaan Lingkungan. Meningkatkan SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Meningkatkan Sarana dan prasarana mendukung tata laksana pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan tenaga kerja pengelolaan lingkungan. Meningkatkan Kompetensi pelaksana tata laksana pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan tenaga kerja pengelolaan lingkungan. Meningkatkan SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa yang menjadi hambatan dalam tata laksana

pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan tenaga kerja pengelolaan lingkungan, adalah meningkatkan kompetensi SDM.

Menurut Usman, (1995: 14) bahwa

Kompetensi merupakan kemampuan dan berwenangan dalam melaksanakan profesinya. Kata "profesional" berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian.

Dengan demikian maka pelaksanaan dimensi tata laksana pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan tenaga kerja pengelolaan lingkungan, telah dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM.

A. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Strategi pengelolaan potensi Hutan Pinus Menjadi Objek Wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis belum semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Masih ada beberapa indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
- b. Hambatan yang dihadapi oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan

pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis adalah Masalah kebijakan dimana mengingat Perum Perhutani merupakan instansi BUMN, sehingga semua keputusan ada pada tingkat pusat, maka jika ada masalah di lapangan sulit dipecahkan karena menunggu perintah dari pusat. SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Sarana dan prasarana yang ada di lokasi hutan pinus di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, masih belum memadai. Proses pengelolaan dilakukan oleh Perum Perhutani, sehingga memperlambat semua kebijakan yang dikeluarkan, mengingat cakupan Perum Perhutani sangat luas.

- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adalah menyusun sebuah kebijakan yang jelas, yang dapat di gunakan untuk mengatasi masalah di lapangan sulit

dipecahkan karena menunggu perintah dari pusat. Meningkatkan SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di lokasi hutan pinus di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, dan menambah sarana lain untuk mempermudah pengelolaannya. Memberikan mandat atau kepercayaan kepada pihak desa setempat untuk pengelolaan objek wisata tersebut, sehingga kebijakan yang dikeluarkan mudah dan tepat sasaran

1. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perum perhutani hendaknya melaksanakan pengelolaan potensi Hutan Pinus Menjadi Objek Wisata, dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.
- b. Perum perhutani hendaknya segera mengatasi hambatan dalam pengelolaan potensi Hutan Pinus Menjadi Objek Wisata dengan cara mengatasi hambatan yang ada.
- c. Perum perhutani hendaknya melaksanakan upaya untuk memperoleh hasil yang maksimal.

A. DAFTAR PUSTAKA

Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Dinamika Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

McMillan & Schumacher, 2001. *The Principalship*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.

Moleong. L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, 1992 *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Satori,1989. *Pengantar Pengelolaan*. Bandung: UPI

Sukamadinata. 2010. *Psikologi Industri*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surakhmad, Winarno. 1994 *Pengantar Penelitian*. Penerbit Tarsito Bandung

Trisnamansyah dan Sukmadinata. 2004 *Psikologi Industri*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Yoeti. 1996. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Angkasa